

**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
TAHUN 2025**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA PANGKALPINANG  
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

|                                                                        | Hal |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Kata Pengantar .....                                                   | i   |
| Daftar Isi .....                                                       | ii  |
| <br>                                                                   |     |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                | 1   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                               | 1   |
| 1.2 Landasan Hukum .....                                               | 3   |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....                                             | 5   |
| 1.4 Sistematika Penyusunan .....                                       | 6   |
| <br>                                                                   |     |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA .....                                | 8   |
| 2.1 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....                              | 8   |
| 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu Capaian Renstra<br>SKPD..... | 19  |
| 2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD .....                | 12  |
| <br>                                                                   |     |
| BAB III TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN .....                      | 13  |
| 3.1 Tujuan dan Sasaran .....                                           | 13  |
| 3.2 Program dan Kegiatan .....                                         | 14  |
| <br>                                                                   |     |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH                    | 20  |
| <br>                                                                   |     |
| BAB V PENUTUP .....                                                    | 26  |

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dan Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya, aparat di Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang diberikan pengetahuan dan kemampuan untuk mengemban dan melaksanakan tugas serta tanggungjawab dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Awal tahun 2025.

Sebagaimana kita ketahui bersama, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang melalui berbagai kegiatan tahunan. Rancangan Rencana Kinerja Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang tahun 2025 menguraikan program, rencana kegiatan dan sasaran tahunan berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya dalam rangka mencapai tujuan dan misi.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Awal Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang tahun 2024 merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean and good governance*) serta berorientasi kepada hasil (*result oriented*) sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rancangan Rencana Kerja Awal Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2024 -2026 ini pada dasarnya merupakan representasi tugas pokok dan fungsi SKPD. Berkenaan dengan itu, sebagaimana konsep manajemen pemerintahan, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta profesional dalam hal perencanaan kinerja dan penganggaran.

Akhir kata, semoga dokumen Rancangan Rencana Kerja Awal Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kinerja dan diharapkan mampu memberikan manfaat serta dampak positif bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara informasi, evaluasi maupun sebagai parameter dalam peningkatan kinerja organisasi. bahwa dokumen ini belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, saran dan masukan yang konstruktif untuk melaksanakan tugas di masa mendatang sangat diharapkan.

**PANGKALPINANG,    April 2024**  
**KEPALA BADAN KESBANGPOL**  
**KOTA PANGKALPINANG**

**DONAL TAMPUBOLON,AP.M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP.19750522 199311 1 001**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah Kota Pangkalpinang yang digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja, target, dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman kepada Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2025 dan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025.

Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Untuk itu dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektifitas dan efesiensi perencanaan di Kota Pangkalpinang, sehingga dapat menghasilkan Renja Perangkat Daerah yang berkualitas, diperlukan Pedoman Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kinerja (Renja) Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Awal Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2024 merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean and good governance*) serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rancangan Rencana Kerja Awal Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ini pun pada dasarnya merupakan representasi tugas pokok dan fungsi SKPD. Berkenaan dengan itu, sebagaimana konsep manajemen pemerintahan, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta profesional dalam hal perencanaan kinerja dan penganggaran. Dalam aplikasinya, penyusunan Rancangan Rencana Kerja Awal Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban dan pengejawantahan semangat reformasi birokrasi yang menghendaki pencapaian maksimal dalam etos kerja.

Rancangan Rencana Kerja Awal Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun tersebut. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategik akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi misinya.

Sedangkan sasaran tahunan, ditetapkan setiap tahun yang disesuaikan dengan kondisi eksisting di internal Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang terutama dalam rangka mengakomodir kebutuhan pihak-pihak terkait dalam hal ini yang dijadikan sebagai kelompok sasaran baik organisasi Pemerintah Kota Pangkalpinang sendiri maupun masyarakat dalam rangka meningkatkan manajemen operasionalnya.

Sebagai dokumen rencana tahunan satuan kerja perangkat daerah, Renja Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam Renstra sesuai arahan dalam RKPD;
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA tahun 2021;
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam rencana kinerja tahunan sebagai wujud dari kinerja satuan perangkat daerah pada tahun 2025;

Dalam tataran teknisnya, RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2025 merupakan salah satu bagian dokumen perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam pembuatan dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang tahun terkait. RKPD inilah yang menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan umum APBD serta prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) yang selanjutnya menjadi dokumen anggaran dalam bentuk APBD.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Awal Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55837), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
15. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 05);
16. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 07);

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1.3.1 *Maksud*

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Awal Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2025 dimaksudkan sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun tersebut, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang.

#### 1.3.2 *Tujuan*

Tujuan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Awal Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang Tahun 2025 adalah :

- 1) Memberikan kerangka operasionalisasi arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang berisi sasaran dan kebijakan daerah serta memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;
- 2) Mewadahi aspirasi *stakeholder* dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dan kesempatan lainnya;
- 3) Menjadi acuan bagi bagian (unit-unit organisasi) dalam mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

#### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN RENJA

Sistematika penulisan Rencana Kerja Awal 2025 minimal memuat :

##### ***BAB I Pendahuluan***

###### 1.1. Latar Belakang

- Pengertian Renja, proses penyusunan, kedudukan Renja tahun rencana dengan dokumen Renstra, keterkaitan antara dokumen Renja dengan Renstra dan RPJMD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

###### 1.2. Landasan Hukum

Memuat peraturan-peraturan yang terkait secara langsung dengan penyusunan Renja SKPD

###### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja SKPD tahun rencana, kaitannya dengan Renstra, dan isu strategis

###### 1.4. Sistematika Penulisan Renja

Susunan dokumen Renja SKPD terkait pengaturan bab serta garis besar isi bab di dalamnya.

##### ***BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu***

###### 2.1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Memuat analisis kinerja pelayanan SKPD yang diukur dengan sejumlah indikator, (spt: SPM, IKK, IKU) sesuai dengan target dalam Renstra SKPD.

###### 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Memuat kemampuan SKPD dlm melaksanakan program dan kegiatannya, identifikasi realisasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD

Memuat hal-hal kritis terkait pencapaian kinerja SKPD serta masalah dan hambatannya, rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dlm program dan kegiatan prioritas tahun yg direncanakan.

## ***BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan***

### 3.1 Tujuan dan Sasaran SKPD

Memuat rumusan tujuan dan sasaran yang mengacu pada Renstra SKPD serta kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran.

### 3.2. Program dan Kegiatan SKPD

Memuat kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat, serta rumusan program dan kegiatan yang telah memperhatikan RKPD dan Renja KL dengan menjelaskan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan.

## ***BAB IV : PENUTUP***

- Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian
- Kaidah pelaksanaan yang memuat arahan Kepala SKPD dalam mempedomani Renja SKPD sebagai acuan untuk penyusunan RKA SKPD
- Rencana tindak lanjut

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**  
**BADAN KESBANGPOL KOTA PANGKALPINANG**  
**TAHUN 2023**

**2.1 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN KESBANGPOL KOTA PANGKALPINANG**

**2.1.1 GAMBARAN KINERJA BADAN KESBANGPOL KOTA PANGKALPINANG**

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100- 441 Tahun 2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

Peraturan Walikota Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Menyelenggarakan fungsi membina, memimpin, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan tugas dan fungsi Badan serta mengkoordinasikan kegiatan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang.

**2.1.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN**

Pelaksanaan urusan wajib Badan Kesbangpol tahun 2025 secara umum dapat dikatakan telah berjalan dengan baik, walaupun masih ada hal teknis yang perlu mendapat perhatian untuk disempurnakan periode mendatang sehingga pelayanan

dasar dapat tercapai. Badan Kesbangpol adalah Koordinasi di bidang pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah.

## **2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD**

Beberapa catatan umum capaian kinerja sepanjang tahun 2023, antara lain :

### **2.2.1 Bidang Sekretariat**

#### **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

##### **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan 26 orang dan terealisasi 99,96%, dengan dana Rp. 2.732.025.271 dan terealisasi sebesar Rp. 2.580.833.862,-

##### **Kegiatan administrasi umum perangkat daerah**

1. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang ditargetkan 1 Paket dan terealisasi 100,00%, dengan dana Rp. 2.107.177,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.102.177,-

2. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang ditargetkan 1 Paket dan terealisasi 99,96%, dengan dana Rp. 122.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 120.620.000,-

3. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor yang ditargetkan 4 paket dan terealisasi 99,96%, dengan dana Rp. 36.003.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.215.000,-

4. Sub kegiatan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan yang ditargetkan 1 paket dan terealisasi 55,24%, dengan dana Rp. 21.058.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.632.000,-

5. Sub kegiatan penyediaan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang ditargetkan 1 laporan dan terealisasi 99,27%, dengan dana Rp. 900.828.781,- dan terealisasi sebesar Rp. 90.166.474,-

##### **Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**

1. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang ditargetkan 12 laporan dan terealisasi 86,53%, dengan dana Rp. 38.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.227.969,-

2. Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang ditargetkan 1 laporan dan terealisasi 95,54%, dengan dana Rp. 10.482.160,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.015.000,-

3. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang ditargetkan 3 laporan dan terealisasi 99,96%, dengan dana Rp. 202.044.818,- dan terealisasi sebesar Rp. 202.044.568,-

### **Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**

1. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, yang ditargetkan 11 unit dan terealisasi 99,96%, dengan dana Rp. 160.346.392,- dan terealisasi sebesar Rp. 113.082.460,-

## **2.2.2 Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama**

### **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

#### **Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang ditargetkan 2200 orang dan terealisasi 100,00%, dengan dana Rp. 1.090.861.596 dan terealisasi sebesar Rp. 1.067.831.358,-

### **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

#### **Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya**

1. Sub kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang ditargetkan 4 lap dan terealisasi 100,00%, dengan dana Rp. 29.401.696 dan terealisasi sebesar Rp. 27.001.696,-
2. Sub kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang ditargetkan 4 laporan dan terealisasi 100,00%, dengan dana Rp. 18.630.300 dan terealisasi sebesar Rp. 18.630.300,-
3. Sub kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang ditargetkan 1 lap dan terealisasi 100,00%, dengan dana Rp. 250.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 250.000.000,-

## **2.2.3 Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan**

### **Program Peningkatan Peran Partai politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

#### **Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik**

1. Sub kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah yang ditargetkan 50 orang dan terealisasi 100,00%, dengan dana Rp. 34.650.000 dan terealisasi sebesar Rp. 34.650.000,-

2. Sub kegiatan bahan perumusan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah yang ditargetkan 1 dok dan terealisasi 100,00%, dengan dana Rp. 15.642.832.550 dan terealisasi sebesar Rp. 15.642.832.550,-
3. Sub kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah yang ditargetkan 1 lap dan terealisasi 99,97%, dengan dana Rp. 71.696.296,- dan terealisasi sebesar Rp. 71.671.696,-

#### **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

##### **Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantaapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan**

1. Sub kegiatan koordinasi di bidang pendataan Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah yang ditargetkan 12 orang dan terealisasi 100,00%, dengan dana Rp. 36.356.696 dan terealisasi sebesar Rp. 36.356.696,-

#### **2.2.4 Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik**

##### **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial**

##### **Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantaapan pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial**

1. Sub kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah yang ditargetkan 40 orang dan terealisasi 98,39%, dengan dana Rp. 137.230.088 dan terealisasi sebesar Rp. 135.021.879,
2. Sub kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah yang ditargetkan 120 orang dan terealisasi 84,61%, dengan dana Rp. 43.757.000 dan terealisasi sebesar Rp. 37.021.879,
3. Sub kegiatan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten / kota yang ditargetkan 4 dokumen dan terealisasi 45,52%, dengan dana Rp. 77.385.000 dan terealisasi sebesar Rp. 35.225.000,

## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan TUPOKSI SKPD

Salah satu faktor dan aktor utama terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah performa atau postur birokrasi yang mapan dan responsif, karena dalam posisi dan perannya yang begitu strategis maka dalam konteks sistem administrasi negara, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang ditopang oleh aparatur yang profesional akan melahirkan model penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan bersih serta berorientasi kepada kinerja dan hasil.

Tugas pokok dan fungsi sangat diperlukan sebagai acuan untuk mencapai sasaran yang diinginkan agar tidak terjadi tumpang tindih di dalam memberikan *output* kepada kelompok sasaran secara menyeluruh. Berkenaan dengan sasaran dan target yang tercantum dalam RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 yang juga menjadi bagian dalam representasi visi dan misi kepala daerah serta rencana strategis SKPD (RENSTRA SKPD), maka pemahaman Tupoksi yang dimiliki oleh masing-masing SKPD dan aparatur pelaksanaanya sebagai ujung tombak didalam pencapaian target yang telah ditetapkan merupakan hal yang sangat penting.

Dalam kaitan tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah (OPD) telah menggarisbawahi akan pentingnya tugas, pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah sebagai titik sentral di dalam menjalankan fungsi-fungsi layanan publik yang amanah dan berkesinambungan sesuai dengan Rencana kerja (Renja) SKPD yang telah dibuat.

Implementasi pelayanan publik dalam lingkup Administrasi Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan dalam rangka pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dengan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang ada oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang.

Salah satu unsur penyelenggaraan pemerintah yang perlu mendapat perhatian dalam upaya reformasi ialah penataan aparatur pemerintah yang meliputi penataan kelembagaan birokrasi pemerintahan, system, dan penataan manajemen sumber daya pegawai (PNS) termasuk tugas pokok dan fungsi.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut:

a. Tujuan

Adapun tujuannya adalah :

Meningkatkan Indeks Demokrasi

b. Indikator Tujuan

Indeks Demokrasi

#### **Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

a. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai adalah :

Terselesainya kasus perselisihan

b. Indikator Sasaran

Persentase kasus perselisihan antar umat beragama, antar suku bangsa, ras dan antar golongan yang diselesaikan

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota  
Pangkalpinang**

| Tujuan                        | Sasaran                          | Indikator                                                                                                      | Target | 2024  | 2025  | 2026  |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Meningkatkan Indeks Demokrasi |                                  | Indeks Demokrasi                                                                                               | Nilai  | 74,80 | 75,00 | 75,15 |
|                               | Terselesainya kasus perselisihan | Persentase kasus perselisihan antar umat beragama, antar suku bangsa, ras dan antar golongan yang diselesaikan | %      | 100%  | 100%  | 100%  |

### 3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

❖ **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**  
**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**  
**Sub Kegiatan :**

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
  - Indikator : Jumlah dokumen Renstra / Renja
2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD
  - Indikator : Jumlah dokumen RKA - SKPD
3. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - Indikator : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

**Sub kegiatan :**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan
  - Indikator : Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD

- Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD

**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

**Sub kegiatan :**

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - Indikator : Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Sesuai Tupoksi
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (PDH)
  - Indikator : Jumlah Pakaian Dinas yang di Buat (dipesan)

**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

**Sub kegiatan :**

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
  - Indikator ; Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Indikator : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Indikator : Jumlah Bahan Logistic Kantor yang Tersedia
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Indikator : Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang di Sediakan
5. Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Indikator : Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan

**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

**Sub kegiatan :**

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Indikator : Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani
2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  - Indikator : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki

3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

- Indikator : Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani

**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**Sub kegiatan :**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
- Indikator : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara

**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

**Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kegiatan :**

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- Indikator : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan
2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- Indikator : Jumlah Rapat Pokja Revolusi Mental
3. Pelaksanaan Monitoring di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- Indikator : Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Bela Negara Bagi Kader PKK dan Bagi Para Pelajar

**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial**

**Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial**

**Kegiatan :**

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah
  - Indikator : Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Tim Terpadu
2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah
  - Indikator : Jumlah Laporan Koordinasi Kewaspadaan Dini di Daerah
3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah
  - Indikator : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Orang Asing (WNA)
4. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik Di Daerah
  - Indikator : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan FORKOPIMDA

## **Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

**Sub Kegiatan :** Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

### **Kegiatan :**

1. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendataan Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah
- Indikator : Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan Ormas

## **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**

**Sub Kegiatan :** Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik.

### **Kegiatan :**

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Indikator : Jumlah Dokumen Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah PARPOL
2. Pelaksanaan Monitoring di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Indikator : Jumlah Laporan Perkembangan Politik

3. Penyusunan Perumusan Bahan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

- Indikator : Jumlah Rekomendasi Diskusi Politik

**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

**Sub Kegiatan :** Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

**Kegiatan :**

1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah

- Indikator : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan FKUB

2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

- Indikator : Jumlah Laporan Monitoring

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan pendanaan perangkat daerah dalam bentuk uraian. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sementara itu kegiatan perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang di laksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Selanjutnya di sajikan secara rinci rencana program, kegiatan dan pendanaan Perangkat Daerah selama kurun satu tahun. Dalam tabel tersebut, masing – masing tujuan, sasaran, program dan kegiatan di lengkapi dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

1. Indikator Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
2. Indikator Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
3. Indikator Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin di ubah berupa hasil pembangunan/layanan yang di peroleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Indikator tujuan dan sasaran yang di pilih idealnya adalah pada skala Indikator Dampak (*impact*) minimal Hasil (*outcome*). Indikator program yang dipilih idealnya pada skala Hasil (*outcome*), dan untuk indikator kegiatan yang di pilih idealnya adalah pada skala Keluaran (*output*).

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Rencana program dan kegiatan tahun 2024 - 2026, sebagai berikut :

Urusan Pemerintahan Umum

Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**  
**Kegiatan Administrasi Umum**
  - a. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - b. penyediaan jasa administrasi keuangan
  - c. penyediaan jasa kebersihan kantor

- d. penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja
- e. penyediaan alat tulis kantor
- f. penyediaan cetak dan penggandaan
- g. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- h. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
- i. penyediaan makanan dan minuman
- j. rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- k. pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- l. pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
- m. penyediaan alat perlengkapan kantor
- n. pembuatan dan pengelolaan website
- o. Penyediaan jasa surat menyurat
- p. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pns
- q. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
- r. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
- s. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- t. Penyediaan peralatan rumah tangga
- u. Penyediaan bahan logistic kantor
- v. Pengadaan mobil jabatan
- w. Pengadaan kendaraan dinas / operasional
- x. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas
- y. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- z. Pengadaan peralatan rumah jabatan / dinas
- aa. Pengadaan peralatan gedung kantor
- bb. Pengadaan mebeleur
- cc. Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan
- dd. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas
- ee. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- ff. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan
- gg. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
- hh. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan perlengkapan rumah jabatan / dinas
- ii. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan gedung kantor
- jj. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan rumah jabatan / dinas
- kk. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

- ll. Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur
  - mm. Rehabilitasi sedang / berat rumah jabatan
  - nn. Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas
  - oo. Rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor
  - pp. Rehabilitasi sedang / berat mobil jabatan
  - qq. Rehabilitasi sedang / berat kendaraan dinas / operasional
2. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- Kegiatan Administrasi Keuangan**
- a. penyusunan laporan keuangan semesteran
  - b. penyusunan laporan keuangan akhir tahun
  - c. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - d. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
  - e. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
  - f. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
  - g. Penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi
  - h. Penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan
  - i. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
3. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
- a. penyusunan RENJA (RKT,RKA dan DPA)
  - b. penyusunan SPIP
  - c. Penyusunan renstra dan renja perangkat daerah
  - d. Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan
  - e. Penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah
  - f. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah
  - g. Evaluasi kinerja perangkat daerah
4. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- Kegiatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
- a. pendidikan dan pelatihan formal
  - b. Pengadaan mesin / kartu absensi
  - c. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
  - d. Pengadaan pakaian kerja lapangan
  - e. Pengadaan pakaian korpri
  - f. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu

- g. Pemulangan pegawai yang pensiun
  - h. Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
  - i. Pemindahan tugas ASN
  - j. Sosialisasi peraturan perundang – undangan
  - k. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan
5. **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**  
**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**
- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
  - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
  - c. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
  - d. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
6. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial**  
**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**
- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah
  - b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah
  - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah

- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah
  - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
7. **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**
- a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat eragama dan penghayat kepercayaan di daerah
  - b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat eragama dan penghayat kepercayaan di daerah
  - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat eragama dan penghayat kepercayaan di daerah
  - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat eragama dan penghayat kepercayaan di daerah
  - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat eragama dan penghayat kepercayaan di daerah
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
8. **Program Peningkatan Peran Partai dan Lembaga Pendidikan Politik Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Poitik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah sertaPemantauan Situasi Politik**

- a. Penysunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya poilitki, peningkatan demokrasi, faslitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah
  - b. Penysunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya poilitki, peningkatan demokrasi, faslitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah
  - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya poilitki, peningkatan demokrasi, faslitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah
  - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya poilitki, peningkatan demokrasi, faslitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah
  - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelapoaran di bidang pendidikan politik, etika budaya poilitki, peningkatan demokrasi, faslitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
9. **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**
- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**
- a. Penyusunan program kerja di bidang pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah
  - b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah
  - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah
  - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional, dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rencana kerja dalam koridor perencanaan merupakan instrumen utama yang harus dikedepankan mengingat dokumen tersebut adalah dokumen dasar dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Renja Awal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

Renja Awal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat dari program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen renstra. Semua Program dan Kegiatan yang disajikan dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang Tahun 2025 adalah merupakan pokok pikiran dan rumusan skala prioritas yang mungkin dapat diupayakan dilaksanakan dengan mempertimbangkan semua program dan kegiatan.

Demikian Rencana Kerja Awal Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Pangkalpinang Tahun 2025 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan untuk dapat diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Pangkalpinang, April 2024  
KEPALA BADAN KESBANGPOL  
KOTA PANGKALPINANG

**DONAL TAMPUBOLON, AP.M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19750522 199311 001



|   |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                      |                      |          |          |          |                      |                      |
|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|
| 8 | 01 | 05 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                        |                              |                                                      | Rp. 177.050.000,00   | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 177.050.000,00   | Rp. 200.000.000,00   |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 57.050.000,00    | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 57.050.000,00    | Rp. 60.000.000,00    |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 120.000.000,00   | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 120.000.000,00   | Rp. 140.000.000,00   |
| 8 | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                               |                              |                                                      | Rp. 318.709.100,00   | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 318.709.100,00   | Rp. 500.000.000,00   |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pementapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                 |                              |                                                      | Rp. 318.709.100,00   | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 318.709.100,00   | Rp. 500.000.000,00   |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 63.442.700,00    | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 63.442.700,00    | Rp. 100.000.000,00   |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 219.644.500,00   | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 219.644.500,00   | Rp. 250.000.000,00   |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 35.621.900,00    | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 35.621.900,00    | Rp. 150.000.000,00   |
| 8 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                              |                              |                                                      | Rp. 4.374.532.793,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 4.374.532.793,00 | Rp. 5.996.500.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                      | Rp. 3.585.011.293,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 3.585.011.293,00 | Rp. 5.000.000.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 3.585.011.293,00 | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 3.585.011.293,00 | Rp. 5.000.000.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                      | Rp. 191.195.000,00   | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 191.195.000,00   | Rp. 296.500.000,00   |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 2.200.600,00     | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 2.200.600,00     | Rp. 2.500.000,00     |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 1.560.000,00     | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 1.560.000,00     | Rp. 30.000.000,00    |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 46.475.400,00    | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 46.475.400,00    | Rp. 55.000.000,00    |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 10.959.000,00    | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 10.959.000,00    | Rp. 9.000.000,00     |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 130.000.000,00   | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 130.000.000,00   | Rp. 200.000.000,00   |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                      | Rp. 474.886.500,00   | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 474.886.500,00   | Rp. 560.000.000,00   |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 41.200.000,00    | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 41.200.000,00    | Rp. 50.000.000,00    |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 8.250.000,00     | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 8.250.000,00     | Rp. 10.000.000,00    |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 425.436.500,00   | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 425.436.500,00   | Rp. 500.000.000,00   |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                    |                              |                                                      | Rp. 123.440.000,00   | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 123.440.000,00   | Rp. 140.000.000,00   |

|               |    |    |      |      |                                                                                                                     |                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                      |       |       |       |                             |                              |
|---------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|------------------------------|
| 8             | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 40.050.000,00                                                                                                                                                                                    | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 40.050.000,00           | Rp. 40.000.000,00            |
| 8             | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 83.390.000,00                                                                                                                                                                                    | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 83.390.000,00           | Rp. 100.000.000,00           |
| <b>Jumlah</b> |    |    |      |      |                                                                                                                     |                              |                                                      | <b>Rp. 8.434.811.493,00</b>                                                                                                                                                                          |       |       |       | <b>Rp. 8.434.811.493,00</b> | <b>Rp. 10.795.462.600,00</b> |
|               |    |    |      |      |                                                                                                                     |                              |                                                      | <p style="text-align: center;">Kota Pangkal Pinang,.....<br/>Kepala BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p> <p style="text-align: right;">Donal Tampubolon, AP., M.Si.<br/>NIP. 197505221993111001</p> |       |       |       |                             |                              |

| Kode |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8    | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah           |
| 8    | 01 | 03 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                         |
| 8    | 01 | 03 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| 8    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                                         |
| 8    | 01 | 04 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                    |
| 8    | 01 | 04 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                               |
| 8    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                                                                                                              |
| 8    | 01 | 05 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                                                     |
| 8    | 01 | 05 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                           |
| 8    | 01 | 05 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                          |

|   |    |    |  |  |                                                                                                            |
|---|----|----|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | 01 | 06 |  |  | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL |
|---|----|----|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | 01 | 06 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                  |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah  |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                               |
| 8 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                               |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                    |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                         |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                        |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                          |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                              |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                          |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                   |

|   |    |    |      |      |                                                      |
|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------|
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------|

|   |    |    |      |      |                                                                                                                     |
|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |





| Sumber Dana                  | Lokasi                                               |           |                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
|                              |                                                      | Tahun - 1 |                      |
|                              |                                                      |           | Belanja Operasi      |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 1.848.962.600,00 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 44.850.000,00    |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 33.629.000,00    |
|                              |                                                      |           | Rp. 33.629.000,00    |
|                              |                                                      |           | Rp. 33.629.000,00    |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 33.629.000,00    |
|                              |                                                      |           | Rp. 177.050.000,00   |
|                              |                                                      |           | Rp. 177.050.000,00   |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 57.050.000,00    |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 120.000.000,00   |

|  |  |  |                    |
|--|--|--|--------------------|
|  |  |  | Rp. 318.709.100,00 |
|--|--|--|--------------------|

|                              |                                                            |  |                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|                              |                                                            |  | Rp. 318.709.100,00   |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa |  | Rp. 63.442.700,00    |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa |  | Rp. 219.644.500,00   |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa |  | Rp. 35.621.900,00    |
|                              |                                                            |  | Rp. 4.374.532.793,00 |
|                              |                                                            |  | Rp. 3.585.011.293,00 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa |  | Rp. 3.585.011.293,00 |
|                              |                                                            |  | Rp. 191.195.000,00   |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa |  | Rp. 2.200.600,00     |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa |  | Rp. 1.560.000,00     |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa |  | Rp. 46.475.400,00    |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa |  | Rp. 10.959.000,00    |

|                                 |                                                            |  |                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa |  | Rp. 130.000.000,00 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--------------------|

|                                 |                                                            |  |                             |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
|                                 |                                                            |  | Rp. 474.886.500,00          |
| PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa |  | Rp. 41.200.000,00           |
| PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa |  | Rp. 8.250.000,00            |
| PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa |  | Rp. 425.436.500,00          |
|                                 |                                                            |  | Rp. 123.440.000,00          |
| PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa |  | Rp. 40.050.000,00           |
| PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa |  | Rp. 83.390.000,00           |
| <b>Jumlah</b>                   |                                                            |  | <b>Rp. 8.434.811.493,00</b> |





---

**Jumlah****Tahun N**

| Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp)          |
|---------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 1.848.962.600,00 |
| Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 44.850.000,00    |
| Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 33.629.000,00    |
| Rp. 0,00      | Rp. 0,00              | Rp. 0,00         | Rp. 33.629.000,00    |
| Rp. 0,00      | Rp. 0,00              | Rp. 0,00         | Rp. 33.629.000,00    |
| Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 33.629.000,00    |
| Rp. 0,00      | Rp. 0,00              | Rp. 0,00         | Rp. 177.050.000,00   |
| Rp. 0,00      | Rp. 0,00              | Rp. 0,00         | Rp. 177.050.000,00   |
| Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 57.050.000,00    |
| Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 120.000.000,00   |

|          |          |          |                    |
|----------|----------|----------|--------------------|
| Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 318.709.100,00 |
|----------|----------|----------|--------------------|

|          |          |          |                      |
|----------|----------|----------|----------------------|
| Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 318.709.100,00   |
| Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 63.442.700,00    |
| Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 219.644.500,00   |
| Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 35.621.900,00    |
| Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 4.374.532.793,00 |
| Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 3.585.011.293,00 |
| Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 3.585.011.293,00 |
| Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 191.195.000,00   |
| Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 2.200.600,00     |
| Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 1.560.000,00     |
| Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 46.475.400,00    |
| Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 10.959.000,00    |

|       |       |       |                    |
|-------|-------|-------|--------------------|
| Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 130.000.000,00 |
|-------|-------|-------|--------------------|

|          |          |          |                             |
|----------|----------|----------|-----------------------------|
| Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 474.886.500,00          |
| Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 41.200.000,00           |
| Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 8.250.000,00            |
| Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 425.436.500,00          |
| Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 123.440.000,00          |
| Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 40.050.000,00           |
| Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 0    | Rp. 83.390.000,00           |
|          |          |          | <b>Rp. 8.434.811.493,00</b> |

Kota Pangkal Pinang,.....  
Kepala BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Donal Tampubolon, AP., M.Si. NIP. 197505221993111001





|                      |
|----------------------|
|                      |
| <b>Tahun + 1</b>     |
| Rp. 1.848.962.600,00 |
| Rp. 60.000.000,00    |
| Rp. 50.000.000,00    |
| Rp. 40.000.000,00    |
| Rp. 40.000.000,00    |
| Rp. 40.000.000,00    |
| Rp. 200.000.000,00   |
| Rp. 200.000.000,00   |
| Rp. 60.000.000,00    |
| Rp. 140.000.000,00   |

|                    |
|--------------------|
| Rp. 500.000.000,00 |
|--------------------|

|                      |
|----------------------|
| Rp. 500.000.000,00   |
| Rp. 100.000.000,00   |
| Rp. 250.000.000,00   |
| Rp. 150.000.000,00   |
| Rp. 5.996.500.000,00 |
| Rp. 5.000.000.000,00 |
| Rp. 5.000.000.000,00 |
| Rp. 296.500.000,00   |
| Rp. 2.500.000,00     |
| Rp. 30.000.000,00    |
| Rp. 55.000.000,00    |
| Rp. 9.000.000,00     |

|                    |
|--------------------|
| Rp. 200.000.000,00 |
|--------------------|

|                              |
|------------------------------|
| Rp. 560.000.000,00           |
| Rp. 50.000.000,00            |
| Rp. 10.000.000,00            |
| Rp. 500.000.000,00           |
| Rp. 140.000.000,00           |
| Rp. 40.000.000,00            |
| Rp. 100.000.000,00           |
| <b>Rp. 10.795.462.600,00</b> |

|  |
|--|
|  |
|--|



**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jl. Rasakunda Pangkalpinang Telp. (0717) 431476

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KOTA PANGKALPINANG**

**NOMOR : / KEP / KESBANGPOL / III / 2025**

**T E N T A N G**

**PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan perlu disusun Rencana Kerja (RENJA);
- b. bahwa RENJA sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat II Sumatera Selatan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 64020);
5. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
13. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 05);
14. Peraturan Walikota Pangkalpinag Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinanag Tahun 2023);

- 15. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 224); tanggal 2 Juli 2024.
- 16 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 07);
- 17.. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020 ( Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua bertugas menghimpun seluruh data dan menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah Tahun 2023 sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja sebagai Pengguna Anggaran
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun 2025
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal Maret 2025  
KEPALA BADAN KESBANGPOL  
KOTA PANGKALPINANG

**DONAL TAMPUBOLON.AP.M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750522 199311 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR : / KEP/KESBANGPOL/ III/ 2025  
TANGGAL : Maret 2025

- 1. Penanggungjawab : Kepala Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang
- 2. Ketua : Sekretaris Kesbangpol Kota Pangkalpinang
- 4. Sekretaris : Analisis Anggaran dan Keuangan
- 5. Anggota :
  - 1. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
  - 2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
  - 3. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ekonomi
  - 4. Petugas Penunjang Kegiatan Kantor / Lapangan

KEPALA BADAN KESBANGPOL  
KOTA PANGKALPINANG

**DONAL TAMPUBOLON.AP.M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750522 199311 1 001

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PANGKAL PINANG  
TAHUN 2024

| NO | KODE            | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                      | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                           |                              |                                                                        |                                                                                                | KELOMPOK SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                 |                                                             |                                                                                  |                                  |                                        |                                               | TARGET 2024                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                    | SUMBER DANA                  | PRIORITAS                                                              |                                                                                                |                    | TARGET                           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                 |                                                             |                                                                                  |                                  |                                        |                                               |                                        |                     |                                           |                              | NASIONAL                                                               | DAERAH                                                                                         |                    |                                  |                     |                                   |
| 1  | 2               | 3                                                           | 4                                                                                | 5                                | 6                                      | 7                                             | 8                                      | 9                   | 10                                        | 11                           | 12                                                                     | 13                                                                                             | 14                 | 15                               | 16                  | 17                                |
|    |                 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                           |                                                                                  |                                  |                                        |                                               |                                        | 32.372.294.000,00   |                                           |                              |                                                                        |                                                                                                |                    |                                  | 8.228.700.000,00    |                                   |
|    | 8               | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                     |                                                                                  |                                  |                                        |                                               |                                        | 32.372.294.000,00   |                                           |                              |                                                                        |                                                                                                |                    |                                  | 8.228.700.000,00    |                                   |
|    | 8.01            | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                 |                                                                                  |                                  |                                        |                                               |                                        | 32.372.294.000,00   |                                           |                              |                                                                        |                                                                                                |                    |                                  | 8.228.700.000,00    |                                   |
| 1. | 8.01.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah |                                  |                                        |                                               | 72,50 Nilai 80 Nilai                   | 4.401.392.238,00    |                                           |                              |                                                                        |                                                                                                |                    |                                  | 4.488.700.000,00    |                                   |
|    | 8.01.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      | Persentase Tersusunnya laporan keuangan Perangkat Daerah SAP                     |                                  |                                        |                                               | 100 %                                  | 3.500.157.178,00    |                                           |                              | Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik | 9. Mensuks eskan Pela ksanaan Pemilihan Legislatif dan PILKADA Serentak                        | Kota Pangkalpinang |                                  | 3.500.000.000,00    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           |                                                                                  |                                  |                                        |                                               |                                        |                     |                                           |                              |                                                                        |                                                                                                |                    |                                  |                     |                                   |
|    |                 |                                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                  |                                        |                                               | 26 Orang/bulan                         | 3.500.157.178,00    | - Kota Pangkal Pinang, Girmaya, Sriwijaya | PENDAP ATAN ASLI DAERAH(PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik | 9. Mensuks eskan Pela ksanaan Pemilihan Legislatif dan PILKADA Serentak                        | Kota Pangkalpinang |                                  | 3.500.000.000,00    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                   | Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran disiplin ASN                            |                                  |                                        |                                               | -15 %                                  | 56.000.000,00       |                                           |                              | Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik | Pembangu nan Demokrasi 9. Mensuks eskan Pela ksanaan Pemilihan Legislatif dan PILKADA Serentak | Kota Pangkalpinang |                                  | 30.000.000,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya      |                                                                                  |                                  |                                        |                                               |                                        |                     |                                           |                              |                                                                        |                                                                                                |                    |                                  |                     |                                   |
|    |                 |                                                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                           |                                  |                                        |                                               | 40 Paket                               | 56.000.000,00       | - Kota Pangkal Pinang, Girmaya, Sriwijaya | PENDAP ATAN ASLI DAERAH(PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik | Pembangu nan Demokrasi 9. Mensuks eskan Pela ksanaan Pemilihan Legislatif dan PILKADA Serentak | Kota Pangkalpinang |                                  | 30.000.000,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

|  |                 |                                                                  |                                                                                    |  |  |  |           |                |                                           |                              |                                                                        |                                                                         |                    |                |                                   |
|--|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
|  | 8.01.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                          |  |  |  | 100 %     | 280.487.200,00 |                                           |                              | Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik | 9. Mensuks eskan Pela ksanaan Pemilihan Legislatif dan PILKADA Serentak | Kota Pangkalpinang | 307.500.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|  | 8.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                    |  |  |  |           |                |                                           |                              |                                                                        |                                                                         |                    |                |                                   |
|  |                 |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |  |  |  | 1 Paket   | 2.203.600,00   | - Kota Pangkal Pinang, Girmaya, Sriwijaya | PENDAP ATAN ASLI DAERAH(PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik | 9. Mensuks eskan Pela ksanaan Pemilihan Legislatif dan PILKADA Serentak | Kota Pangkalpinang | 2.500.000,00   | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|  | 8.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                    |  |  |  |           |                |                                           |                              |                                                                        |                                                                         |                    |                |                                   |
|  |                 |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |  |  |  | 1 Paket   | 37.000.000,00  | - Kota Pangkal Pinang, Girmaya, Sriwijaya | PENDAP ATAN ASLI DAERAH(PAD) | -                                                                      | 9. Mensuks eskan Pela ksanaan Pemilihan Legislatif dan PILKADA Serentak | Kota Pangkalpinang | 50.000.000,00  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|  | 8.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                    |  |  |  |           |                |                                           |                              |                                                                        |                                                                         |                    |                |                                   |
|  |                 |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |  |  |  | 4 Paket   | 29.862.500,00  | - Kota Pangkal Pinang, Girmaya, Sriwijaya | PENDAP ATAN ASLI DAERAH(PAD) | -                                                                      | 9. Mensuks eskan Pela ksanaan Pemilihan Legislatif dan PILKADA Serentak | Kota Pangkalpinang | 40.000.000,00  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|  | 8.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                                                                                    |  |  |  |           |                |                                           |                              |                                                                        |                                                                         |                    |                |                                   |
|  |                 |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        |  |  |  | 1 Paket   | 8.004.100,00   | - Kota Pangkal Pinang, Girmaya, Sriwijaya | PENDAP ATAN ASLI DAERAH(PAD) | -                                                                      | 9. Mensuks eskan Pela ksanaan Pemilihan Legislatif dan PILKADA Serentak | Kota Pangkalpinang | 15.000.000,00  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|  | 8.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |  |  |  |           |                |                                           |                              |                                                                        |                                                                         |                    |                |                                   |
|  |                 |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |  |  |  | 1 Laporan | 203.417.000,00 | - Kota Pangkal Pinang, Girmaya, Sriwijaya | PENDAP ATAN ASLI DAERAH(PAD) | -                                                                      | 9. Mensuks eskan Pela ksanaan Pemilihan Legislatif dan PILKADA Serentak | Kota Pangkalpinang | 200.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|  | 8.01.01.2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah                                 |  |  |  | 100 %     | 150.000.000,00 |                                           |                              | Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik | 9. Mensuks eskan Pela ksanaan Pemilihan Legislatif dan PILKADA Serentak | Kota Pangkalpinang | 180.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|  | 8.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                    |  |  |  |           |                |                                           |                              |                                                                        |                                                                         |                    |                |                                   |

|    |                 |                                                                                                                     |                                                                                                        |       |  |       |            |                |                                           |                               |                                                                         |                                                                         |                    |       |                |                                   |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|----------------|-----------------------------------|
|    |                 |                                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     |       |  |       | 10 Unit    | 150.000.000,00 | - Kota Pangkal Pinang, Girmaya, Sriwijaya | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polihukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik | 9. Mensuks eskan Pela ksanaan Pemilihan Legislatif dan PILKADA Serentak | Kota Pangkalpinang |       | 180.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                     |       |  |       | 100 %      | 251.494.468,00 |                                           |                               | Memperkuat Stabilitas Polihukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik | 9. Mensuks eskan Pela ksanaan Pemilihan Legislatif dan PILKADA Serentak | Kota Pangkalpinang |       | 301.200.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |       |  |       |            |                |                                           |                               |                                                                         |                                                                         |                    |       |                |                                   |
|    |                 |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |       |  |       | 12 Laporan | 41.200.000,00  | - Kota Pangkal Pinang, Girmaya, Sriwijaya | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polihukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik | 9. Mensuks eskan Pela ksanaan Pemilihan Legislatif dan PILKADA Serentak | Kota Pangkalpinang |       | 41.200.000,00  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |                                                                                                        |       |  |       |            |                |                                           |                               |                                                                         |                                                                         |                    |       |                |                                   |
|    |                 |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       |       |  |       | 1 Laporan  | 8.250.000,00   | - Kota Pangkal Pinang, Girmaya, Sriwijaya | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                       | 9. Mensuks eskan Pela ksanaan Pemilihan Legislatif dan PILKADA Serentak | Kota Pangkalpinang |       | 10.000.000,00  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |       |  |       |            |                |                                           |                               |                                                                         |                                                                         |                    |       |                |                                   |
|    |                 |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |       |  |       | 3 Laporan  | 202.044.468,00 | - Kota Pangkal Pinang, Girmaya, Sriwijaya | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                       | 9. Mensuks eskan Pela ksanaan Pemilihan Legislatif dan PILKADA Serentak | Kota Pangkalpinang |       | 250.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Barang Milik Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik                                            |       |  |       | 75 %       | 163.253.392,00 |                                           |                               | Memperkuat Stabilitas Polihukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik | 9. Mensuks eskan Pela ksanaan Pemilihan Legislatif dan PILKADA Serentak | Kota Pangkalpinang |       | 170.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |       |  |       |            |                |                                           |                               |                                                                         |                                                                         |                    |       |                |                                   |
|    |                 |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |       |  |       | 11 Unit    | 163.253.392,00 | - Kota Pangkal Pinang, Girmaya, Sriwijaya | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polihukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik | 9. Mensuks eskan Pela ksanaan Pemilihan Legislatif dan PILKADA Serentak | Kota Pangkalpinang |       | 170.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 2. | 8.01.02         | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                        | Cakupan Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan                                                      | 100 % |  | 100 % | 100 %      | 785.368.096,00 |                                           |                               |                                                                         |                                                                         |                    | 100 % | 800.000.000,00 |                                   |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |  |  |            |                   |                                           |                               |                                                                       |                                                                         |                                                                         |                    |       |                  |                                    |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|------------------|------------------------------------|
|    | 8.01.02.2.01    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                               | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Nilai - Nilai Wawasan Kebangsaan                                                                                                                                                                                                      | 100 % |  |  | 100 %      | 100 %             | 785.368.096,00                            |                               |                                                                       | Memperkuat Stabilitas Poluhkank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik   | 9. Mensuks eskan Pela ksanaan Pemilihan Legislatif dan PILKADA Serentak | Kota Pangkalpinang | 100 % | 800.000.000,00   | BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.02.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |  |  |            |                   |                                           |                               |                                                                       |                                                                         |                                                                         |                    |       |                  |                                    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                   |       |  |  | 2200 Orang | 785.368.096,00    | - Kota Pangkal Pinang, Girmaya, Sriwijaya | PENDAP ATAN ASLI DAERA H(PAD) | Memperkuat Stabilitas Poluhkank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik | 9. Mensuks eskan Pela ksanaan Pemilihan Legislatif dan PILKADA Serentak | Kota Pangkalpinang                                                      |                    |       | 800.000.000,00   | BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK |
| 3. | 8.01.03         | <b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>                                                                                                                                         | <i>Persentase Peningkatan Pembinaan Serta Pendidikan Politik Bagi Partai Politik</i>                                                                                                                                                                                          | 100 % |  |  | 100 %      | 100 %             | 26.547.846.096,00                         |                               |                                                                       |                                                                         |                                                                         |                    | 100 % | 2.178.000.000,00 |                                    |
|    | 8.01.03.2.01    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik       | <i>Persentase Pencairan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik</i>                                                                                                                                                                                                              | 100 % |  |  | 100 %      | 100 %             | 26.547.846.096,00                         |                               |                                                                       | Memperkuat Stabilitas Poluhkank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik   | 9. Mensuks eskan Pela ksanaan Pemilihan Legislatif dan PILKADA Serentak | Kota Pangkalpinang | 100 % | 2.178.000.000,00 | BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.03.2.01.02 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |  |  |            |                   |                                           |                               |                                                                       |                                                                         |                                                                         |                    |       |                  |                                    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang                  |       |  |  | 1 Dokumen  | 26.382.698.500,00 | - Kota Pangkal Pinang, Girmaya, Sriwijaya | PENDAP ATAN ASLI DAERA H(PAD) | Memperkuat Stabilitas Poluhkank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik | 9. Mensuks eskan Pela ksanaan Pemilihan Legislatif dan PILKADA Serentak | Kota Pangkalpinang                                                      |                    |       | 2.000.000.000,00 | BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.03.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |  |  |            |                   |                                           |                               |                                                                       |                                                                         |                                                                         |                    |       |                  |                                    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |       |  |  | 50 Orang   | 109.360.900,00    | - Kota Pangkal Pinang, Girmaya, Sriwijaya | PENDAP ATAN ASLI DAERA H(PAD) | -                                                                     | 9. Mensuks eskan Pela ksanaan Pemilihan Legislatif dan PILKADA Serentak | Kota Pangkalpinang                                                      |                    |       | 120.000.000,00   | BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.03.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |  |  |            |                   |                                           |                               |                                                                       |                                                                         |                                                                         |                    |       |                  |                                    |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |  |           |           |                |                                            |                               |                                                                       |                                                                       |                    |           |                |                                   |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-----------|-----------|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                      | <i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i> |            |  |           | 1 Laporan | 55.786.696,00  | - Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                     | -                                                                     | Kota Pangkalpinang |           | 58.000.000,00  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 4. | 8.01.04         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>                                                                                                                                                 | <b>Persentase Ormas/LSM yang di Berdayakan dan di Awasi</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 50 %       |  | 20 %      | 20 %      | 55.654.346,00  |                                            |                               |                                                                       |                                                                       |                    | 30 %      | 60.000.000,00  |                                   |
|    | 8.01.04.2.01    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                   | <i>Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 %       |  | 20 %      | 20 %      | 55.654.346,00  |                                            |                               | Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik | 9. Mensukseskan Pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan PILKADA Serentak | Kota Pangkalpinang | 30 %      | 60.000.000,00  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.04.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |  |           |           |                |                                            |                               |                                                                       |                                                                       |                    |           |                |                                   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                      | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>                                                                                                                        |            |  |           | 12 Orang  | 55.654.346,00  | - Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik | 9. Mensukseskan Pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan PILKADA Serentak | Kota Pangkalpinang |           | 60.000.000,00  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 5. | 8.01.05         | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>                                                                                                                                      | <b>Persentase Peningkatan Kewaspadaan dan Pencegahan Narkoba</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 100 %      |  | 80 %      | 80 %      | 251.999.896,00 |                                            |                               |                                                                       |                                                                       |                    | 80 %      | 337.000.000,00 |                                   |
|    | 8.01.05.2.01    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                    | <i>Jumlah Laporan Monitoring</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 Laporan |  | 4 Laporan | 4 Laporan | 251.999.896,00 |                                            |                               | Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik | 9. Mensukseskan Pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan PILKADA Serentak | Kota Pangkalpinang | 4 Laporan | 337.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.05.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |  |           |           |                |                                            |                               |                                                                       |                                                                       |                    |           |                |                                   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                      | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>                                                                                   |            |  |           | 100 Orang | 170.000.000,00 | - Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik | 9. Mensukseskan Pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan PILKADA Serentak | Kota Pangkalpinang |           | 250.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.05.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |  |           |           |                |                                            |                               |                                                                       |                                                                       |                    |           |                |                                   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                      | <i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>                                                                  |            |  |           | 4 Laporan | 81.999.896,00  | - Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                     | 9. Mensukseskan Pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan PILKADA Serentak | Kota Pangkalpinang |           | 87.000.000,00  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |       |           |                          |                                           |                               |                                                                         |                                                                         |                    |       |                         |                                    |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------|------------------------------------|
| 6. | 8.01.06            | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                                | <i>Persentase Gangguan atau Konflik yang Tertangani</i>                                                                                                                                                                                                                                     | 100 % |  | 100 % | 100 %     | 330.033.328,00           |                                           |                               |                                                                         |                                                                         |                    | 100 % | 365.000.000,00          |                                    |
|    | 8.01.06.2.01       | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                  | <i>Persentase Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah</i>     | 100 % |  | 100 % | 100 %     | 330.033.328,00           |                                           |                               | Memperkuat Stabilitas Polihukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik | 9. Mensuks eskan Pela ksanaan Pemilihan Legislatif dan PILKADA Serentak | Kota Pangkalpinang | 100 % | 365.000.000,00          | BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.06.2.01.03    | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |       |           |                          |                                           |                               |                                                                         |                                                                         |                    |       |                         |                                    |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i> |       |  |       | 120 Orang | 69.795.340,00            | - Kota Pangkal Pinang, Girmaya, Sriwijaya | PENDAP ATAN ASLI DAERA H(PAD) | Memperkuat Stabilitas Polihukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik | 9. Mensuks eskan Pela ksanaan Pemilihan Legislatif dan PILKADA Serentak | Kota Pangkalpinang |       | 55.000.000,00           | BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.06.2.01.04    | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |       |           |                          |                                           |                               |                                                                         |                                                                         |                    |       |                         |                                    |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>            |       |  |       | 40 Orang  | 202.630.788,00           | - Kota Pangkal Pinang, Girmaya, Sriwijaya | PENDAP ATAN ASLI DAERA H(PAD) | -                                                                       | 9. Mensuks eskan Pela ksanaan Pemilihan Legislatif dan PILKADA Serentak | Kota Pangkalpinang |       | 250.000.000,00          | BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.06.2.01.06    | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |       |           |                          |                                           |                               |                                                                         |                                                                         |                    |       |                         |                                    |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>                                                                                                                                                                                                     |       |  |       | 4 Dokumen | 57.607.200,00            | - Kota Pangkal Pinang, Girmaya, Sriwijaya | PENDAP ATAN ASLI DAERA H(PAD) | -                                                                       | 9. Mensuks eskan Pela ksanaan Pemilihan Legislatif dan PILKADA Serentak | Kota Pangkalpinang |       | 60.000.000,00           | BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK |
|    | <b>J U M L A H</b> |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |       |           | <b>32.372.294.000,00</b> |                                           |                               |                                                                         |                                                                         |                    |       | <b>8.228.700.000,00</b> |                                    |

|                                                                                |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | REKAPITULASI<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
| Pemerintahan Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025                           |                                     |

Organisasi :   BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Rincian Anggaran Belanja</div> <div>Berdasarkan Program dan Kegiatan</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------|

| Kode                              |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sumber Dana                  | Lokasi                                               | Jumlah    |                      |               |                       |                  |                      |                      |
|-----------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                      | Tahun - 1 | Tahun N              |               |                       |                  |                      | Tahun + 1            |
|                                   |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                      |           | Belanja Operasi      | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp)          |                      |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                      |           |                      |               |                       |                  |                      |                      |
| 8                                 |    |    |      |      | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                      |           |                      |               |                       |                  |                      |                      |
| 8                                 | 01 |    |      |      | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                      |           |                      |               |                       |                  |                      |                      |
| 8                                 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                      |           | Rp. 1.603.449.000,00 | Rp. 0,00      | Rp. 0,00              | Rp. 0,00         | Rp. 1.603.449.000,00 | Rp. 2.100.000.000,00 |
| 8                                 | 01 | 02 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                         |                              |                                                      |           | Rp. 1.603.449.000,00 | Rp. 0,00      | Rp. 0,00              | Rp. 0,00         | Rp. 1.603.449.000,00 | Rp. 2.100.000.000,00 |
| 8                                 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 411.869.000,00   | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 411.869.000,00   | Rp. 600.000.000,00   |
| 8                                 | 01 | 02 | 2.01 | 0008 | Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 1.191.580.000,00 | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 1.191.580.000,00 | Rp. 1.500.000.000,00 |
| 8                                 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                                          |                              |                                                      |           | Rp. 1.927.441.600,00 | Rp. 0,00      | Rp. 0,00              | Rp. 0,00         | Rp. 1.927.441.600,00 | Rp. 1.958.962.600,00 |
| 8                                 | 01 | 03 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik |                              |                                                      |           | Rp. 1.927.441.600,00 | Rp. 0,00      | Rp. 0,00              | Rp. 0,00         | Rp. 1.927.441.600,00 | Rp. 1.958.962.600,00 |

| Kode |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sumber Dana                  | Lokasi                                               | Jumlah    |                      |               |                       |                  |                      |                      |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                      | Tahun - 1 | Tahun N              |               |                       |                  |                      | Tahun + 1            |
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                      |           | Belanja Operasi      | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp)          |                      |
| 8    | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 1.848.962.600,00 | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 1.848.962.600,00 | Rp. 1.848.962.600,00 |
| 8    | 01 | 03 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 44.850.000,00    | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 44.850.000,00    | Rp. 60.000.000,00    |
| 8    | 01 | 03 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 33.629.000,00    | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 33.629.000,00    | Rp. 50.000.000,00    |
| 8    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                      |           | Rp. 33.629.000,00    | Rp. 0,00      | Rp. 0,00              | Rp. 0,00         | Rp. 33.629.000,00    | Rp. 40.000.000,00    |
| 8    | 01 | 04 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                    |                              |                                                      |           | Rp. 33.629.000,00    | Rp. 0,00      | Rp. 0,00              | Rp. 0,00         | Rp. 33.629.000,00    | Rp. 40.000.000,00    |
| 8    | 01 | 04 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 33.629.000,00    | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 33.629.000,00    | Rp. 40.000.000,00    |
| 8    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                      |           | Rp. 177.050.000,00   | Rp. 0,00      | Rp. 0,00              | Rp. 0,00         | Rp. 177.050.000,00   | Rp. 200.000.000,00   |
| 8    | 01 | 05 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                                                     |                              |                                                      |           | Rp. 177.050.000,00   | Rp. 0,00      | Rp. 0,00              | Rp. 0,00         | Rp. 177.050.000,00   | Rp. 200.000.000,00   |
| 8    | 01 | 05 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 57.050.000,00    | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 57.050.000,00    | Rp. 60.000.000,00    |
| 8    | 01 | 05 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 120.000.000,00   | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 120.000.000,00   | Rp. 140.000.000,00   |
| 8    | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                                                            |                              |                                                      |           | Rp. 318.709.100,00   | Rp. 0,00      | Rp. 0,00              | Rp. 0,00         | Rp. 318.709.100,00   | Rp. 500.000.000,00   |

| Kode |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                    | Sumber Dana                  | Lokasi                                               | Jumlah    |                      |               |                       |                  |                      |                      |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                      | Tahun - 1 | Tahun N              |               |                       |                  |                      | Tahun + 1            |
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                      |           | Belanja Operasi      | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp)          |                      |
| 8    | 01 | 06 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                  |                              |                                                      |           | Rp. 318.709.100,00   | Rp. 0,00      | Rp. 0,00              | Rp. 0,00         | Rp. 318.709.100,00   | Rp. 500.000.000,00   |
| 8    | 01 | 06 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 63.442.700,00    | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 63.442.700,00    | Rp. 100.000.000,00   |
| 8    | 01 | 06 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 219.644.500,00   | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 219.644.500,00   | Rp. 250.000.000,00   |
| 8    | 01 | 06 | 2.01 | 0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 35.621.900,00    | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 35.621.900,00    | Rp. 150.000.000,00   |
| 8    | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                               |                              |                                                      |           | Rp. 4.374.532.793,00 | Rp. 0,00      | Rp. 0,00              | Rp. 0,00         | Rp. 4.374.532.793,00 | Rp. 5.996.500.000,00 |
| 8    | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                      |           | Rp. 3.585.011.293,00 | Rp. 0,00      | Rp. 0,00              | Rp. 0,00         | Rp. 3.585.011.293,00 | Rp. 5.000.000.000,00 |
| 8    | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 3.585.011.293,00 | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 3.585.011.293,00 | Rp. 5.000.000.000,00 |
| 8    | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                      |           | Rp. 191.195.000,00   | Rp. 0,00      | Rp. 0,00              | Rp. 0,00         | Rp. 191.195.000,00   | Rp. 296.500.000,00   |
| 8    | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 2.200.600,00     | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 2.200.600,00     | Rp. 2.500.000,00     |
| 8    | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 1.560.000,00     | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 1.560.000,00     | Rp. 30.000.000,00    |
| 8    | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 46.475.400,00    | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 46.475.400,00    | Rp. 55.000.000,00    |
| 8    | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 10.959.000,00    | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 10.959.000,00    | Rp. 9.000.000,00     |
| 8    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |           | Rp. 130.000.000,00   | Rp. 0         | Rp. 0                 | Rp. 0            | Rp. 130.000.000,00   | Rp. 200.000.000,00   |

[illegible]